

Peran Aktif Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Sistem Pembayaran

Sulfaunsilah¹, Wesilatul Hokamah², Sinta Fatmala Sari³, Rini Puji Astuti⁴

^{1,2,3,4}Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

¹ sulfaunsilah@gmail.com, ² wasilatulhokamah@gmail.com, ³ sinntfatmalas@gmail.com, ⁴ rinipuji.astuti111983@gmail.com

Abstrak

Terselenggaranya sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal merupakan bagian penting dari menjaga sistem keuangan tetap stabil. Sistem pembayaran adalah infrastruktur yang sangat penting untuk aktivitas ekonomi sehari-hari dan juga merupakan alat penting untuk mengkomunikasikan kebijakan moneter dan mengelola risiko sistemik. Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat terlibat dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sistem pembayaran. Peran ini sangat penting untuk memastikan sistem keuangan secara keseluruhan stabil. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui sistem pembayaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif secara deskriptif dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian literatur, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi Data dari berbagai referensi yang terkait dengan topik penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Bank Indonesia memiliki peran strategis yang krusial dalam menjaga kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran di Indonesia. BI saat ini secara aktif mendukung perkembangan sistem pembayaran melalui berbagai inisiatif seperti QRIS dan BI-FAST, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang inklusif, efisien, dan aman. Pengaturan sistem pembayaran oleh BI mencakup berbagai aspek, termasuk alat pembayaran, penyelenggara, infrastruktur, dan mekanisme pembayaran, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Meskipun terdapat prospek positif seperti pertumbuhan ekonomi dan inovasi digital, BI juga menghadapi berbagai tantangan kompleks. Tantangan-tantangan tersebut meliputi perubahan ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, dinamika ekonomi domestik, dan kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan fintech.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Stabilitas, Keuangan, Pembayaran

PENDAHULUAN

Salah satu tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran adalah menjaga stabilitas sistem keuangan selain sistem moneter. Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tanpa disertai dengan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan tidak akan banyak membantu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Seperti halnya stabilitas moneter dan stabilitas keuangan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter didukung oleh stabilitas keuangan, dan kebijakan moneter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas keuangan. Karena sistem keuangan berfungsi sebagai saluran utama untuk transmisi kebijakan moneter, gangguan pada stabilitas sistem keuangan dapat menghambat proses transmisi kebijakan moneter secara optimal. Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara mendasar dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan karena terganggunya sistem keuangan secara keseluruhan. Akibatnya, menjaga kestabilan sistem keuangan tetap menjadi salah satu tanggung jawab utama Bank Indonesia.

Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas keuangan sangat penting. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur dan mengawasi sektor perbankan. Menurut Bank Indonesia dalam Lintangari,dkk (2018:15) menjelaskan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan suatu aktifitas yang dilakukan dengan meneliti faktor-faktor penyebab dari instabilitas pada sektor keuangan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di industri keuangan termasuk perubahan harga pasar, risiko kredit, ketidakseimbangan likuiditas, dan ancaman siber yang dapat mengganggu transaksi ekonomi. Ini termasuk mengawasi dan mengendalikan risiko sistemik melalui kebijakan yang terarah, meningkatkan infrastruktur sistem pembayaran, dan bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya untuk menjaga sektor keuangan tetap stabil. Oleh karena itu, Bank Indonesia berusaha untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terselenggaranya sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal merupakan bagian penting dari menjaga sistem keuangan tetap stabil. Sistem pembayaran adalah infrastruktur yang sangat penting untuk aktivitas ekonomi sehari-hari dan juga merupakan alat penting untuk mengkomunikasikan kebijakan moneter dan mengelola risiko sistemik. Oleh karena itu, Bank Indonesia sangat terlibat dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sistem pembayaran. Peran ini sangat penting untuk memastikan sistem keuangan secara keseluruhan stabil.

Lanskap sistem pembayaran telah sangat berubah sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan digitalisasi. Meskipun kemajuan seperti pembayaran elektronik, dompet digital, dan teknologi berbasis blockchain membuat hidup lebih mudah, mereka

juga menghadirkan masalah baru, seperti ancaman siber dan kemungkinan penyalahgunaan data. Dalam menghadapi situasi seperti ini, BI berperan aktif dalam memastikan bahwa inovasi tersebut sesuai dengan keamanan, efisiensi, dan inklusi keuangan. BI berusaha membangun ekosistem pembayaran yang mendukung transformasi digital sekaligus mempertahankan sistem keuangan dengan memperkuat regulasi, mengembangkan infrastruktur sistem pembayaran seperti BI-FAST, dan bekerja sama dengan pelaku industri.

Pengembangan dan perluasan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah salah satu upaya BI dalam mendukung ekosistem pembayaran digital. Pada tahun 2025, QRIS telah menjadi tulang punggung sistem pembayaran nontunai di Indonesia, memungkinkan transaksi yang cepat, aman, dan murah di berbagai industri, mulai dari bisnis kecil hingga perusahaan besar. QRIS terus diperkuat oleh BI melalui inovasi teknologi dan pengawasan ketat untuk mengurangi risiko. Oleh karena itu, QRIS tidak hanya menjadi alat transaksi; itu juga merupakan bagian dari komitmen BI untuk membangun sistem pembayaran yang inklusif, aman, dan mendukung stabilitas keuangan nasional.

Selain itu, BI juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pembayaran dapat mendukung kebijakan moneter dan stabilitas makroekonomi. Sistem pembayaran yang efisien memungkinkan transmisi kebijakan moneter berjalan lebih efektif, sehingga membantu BI dalam mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Dengan mengintegrasikan teknologi dan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, BI berupaya menciptakan sistem pembayaran yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masa kini, tetapi juga adaptif terhadap tantangan di masa depan.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui sistem pembayaran. Untuk mencapai tujuan ini, kami mengangkat judul “Peran Aktif Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Sistem Pembayaran” sebagai judul dari jurnal ini.

METODE

Penelitian ini berfokus pada Peran Aktif Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Sistem Pembayaran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian secara deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah metode pengumpulan, penyajian data, peringkasan, sehingga diperoleh informasi yang lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2016). Tujuannya untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran Bank Indonesia dalam konteks nyata. Dengan mengeksplorasi berbagai aspek terkait, peran Strategis Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran, digitalisasi dan inovasi sistem pembayaran, pengaturan Sistem Pembayaran di Indonesia serta tantangan dan prospek ke depan yang di hadapi BI. Topik yang diteliti menjadi fokus utama penelitian ini, yang memerlukan pemahaman mendalam untuk merancang penelitian yang efektif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian literatur, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi Data dari berbagai referensi yang terkait dengan topik penelitian. Metode ini, dikenal juga sebagai tinjauan pustaka, melibatkan pengumpulan data dari berbagai tulisan seperti artikel, jurnal, dan literatur lainnya guna mendukung dan memperkuat argumen penelitian. Peneliti memilih metode ini untuk memperoleh landasan teori yang dapat membantu menjelaskan masalah yang diteliti, sebagai langkah awal dalam memahami masalah secara lebih baik sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Tanggung jawab Bank Indonesia terkait sistem pembayaran tidak secara eksplisit diuraikan dalam UU No. 13 tahun 1968 terkait Bank Sentral. Dengan dikeluarkannya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, telah ditetapkan dengan jelas bahwa salah satu tanggung jawab Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah adalah mengatur dan memastikan kelancaran sistem pembayaran. Tugas ini melengkapi dua tugas utama lainnya: menentukan dan melaksanakan kebijakan moneter, serta mengawasi dan mengatur bank.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 menjelaskan bahwa ketiga tugas utama Bank Indonesia saling berhubungan erat dalam upaya mencapai tujuan utamanya, yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, contohnya dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Keberhasilan tugas ini sangat bergantung pada sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan terpercaya, yang merupakan fokus dari tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lebih lanjut, sistem pembayaran yang baik memerlukan fondasi perbankan yang kuat dan sehat, yang menjadi tujuan dari tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank. Pada akhirnya, sistem perbankan yang sehat ini akan mendukung efektivitas pengendalian moneter.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia secara jelas menyatakan bahwa mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran merupakan salah satu tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, selain dua tugas utamanya yang lain, kelancaran sistem pembayaran, disamping dua tugas pokok lainnya yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan mengawasi bank. Dalam penjelasan pasal 8 UU No.23 tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan ketiga tugas pokok Bank Indonesia ini mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan fokus dari tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Lebih lanjut, sistem pembayaran yang baik memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang menjadi tujuan dari tugas mengatur dan mengawasi bank.

Akhirnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter, mengingat implementasi kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Bank Indonesia memegang peranan penting dalam mewujudkan kinerja keuangan yang sehat, terutama di sektor perbankan. Hal ini dicapai melalui pengawasan dan regulasi. Bank Indonesia berwenang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Jika terjadi gagal bayar dalam sistem pembayaran, risiko serius dapat muncul dan mengganggu kelancaran sistem secara keseluruhan. Kegagalan ini berpotensi menular dan menyebabkan gangguan sistemik. Untuk mengatasi risiko yang terus meningkat dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia mengembangkan berbagai mekanisme dan aturan. Salah satunya adalah implementasi sistem pembayaran *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang meningkatkan keamanan dan kecepatan transaksi. Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi potensi risiko (Bernando Aldo Yosua, 2024).

Sebagai bank sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia (BI) memiliki peran strategis yang sangat penting dalam memastikan kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran di Indonesia. Peran ini tercermin dalam berbagai hal, di antaranya:

a. Pengawas dan Pengembang Sistem Pembayaran

Bank Indonesia memiliki otoritas khusus dalam perekonomian negara. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai pengawas (*controller*) dan pengembang (*fasilitator*) sistem pembayaran di Indonesia. Sebagai pengawas, Bank Indonesia bertugas memastikan kelancaran seluruh proses pembayaran dengan menetapkan peraturan, persyaratan, dan sanksi yang mengikat penyedia layanan keuangan. Hal ini bertujuan untuk mengatur penggunaan berbagai metode pembayaran, mulai dari transaksi tunai hingga QRIS, guna meminimalkan risiko penyalahgunaan. Contohnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan sebagai pengembang (*fasilitator*) dengan terus menyempurnakan sistem pembayaran yang ada, dengan tujuan utama menjamin kelancaran semua transaksi.

b. Penerbitan Izin yang Tepat dalam Sistem Pembayaran

Salah satu langkah awal Bank Indonesia dalam mengatur sistem pembayaran adalah menerbitkan izin operasional dan izin badan usaha. Bank Indonesia tidak secara bebas memberikan izin kepada pihak atau perusahaan untuk menawarkan produk atau layanan keuangan. Tindakan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 dan Nomor 23/7/PBI/2021. Hal ini sejalan dengan peran Bank Indonesia dalam melindungi aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebelum menyimpan dana Anda di bank atau penyedia jasa keuangan, penting untuk memastikan bahwa lembaga tersebut telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

c. Pencegahan Risiko dalam Sistem Pembayaran

Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran juga mencakup upaya pencegahan risiko gagal bayar. Kelancaran sistem pembayaran akan terganggu jika terjadi gagal bayar. Agar perekonomian Indonesia tidak terhambat akibat dampak yang meluas, Bank Indonesia terus mengembangkan mekanisme untuk mengurangi berbagai risiko dalam sistem pembayaran yang semakin meningkat. Salah satu inisiatifnya adalah memperkenalkan sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang meningkatkan keamanan dan kecepatan transaksi pembayaran secara *real time*.

d. Pengaturan dan Pengembangan Sistem Pembayaran

Sebagai bagian dari kewenangannya dalam perekonomian Indonesia, salah satu tugas utama Bank Indonesia adalah mengatur dan memfasilitasi sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia. Dalam fungsi pengawasannya (*controller*), Bank Indonesia bertugas memastikan kelancaran seluruh proses dalam sistem pembayaran. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan peraturan, persyaratan, serta sanksi yang mengikat penyedia jasa keuangan. Aturan penggunaan sistem pembayaran, mulai dari transaksi tunai, kartu debit dan kredit, hingga QRIS, dirancang untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan sebagai perantara (*go-between* atau fasilitator) yang bertugas menyempurnakan sistem pembayaran yang sudah ada, dengan tujuan utama menjamin kelancaran semua transaksi.

e. Bank Indonesia sebagai Penyelenggara Utama Sistem Pembayaran

Sebelumnya, Pos Indonesia pernah berperan dalam pengelolaan sistem pembayaran, namun kini tanggung jawab tersebut sepenuhnya diemban oleh Bank Indonesia. Dengan semakin meningkatnya penggunaan transaksi tunai dan non-tunai, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran semakin krusial. Bank Indonesia mengoperasikan dua sistem pembayaran utama, yaitu Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS) Bank Indonesia, yang telah dibahas sebelumnya (Achmad Fauzi, 2023).

Digitalisasi Dan Inovasi Sistem Pembayaran

Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia) mendefinisikan "Sistem Pembayaran" sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan transfer dana untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan alat pembayaran, prosedur perbankan yang berkaitan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank yang digunakan dalam proses pembayaran. Berbagai kendala dalam penggunaan uang tunai (kertas dan logam) mendorong munculnya inovasi-inovasi baru dalam penciptaan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai yang saat ini kita kenal ada yang berbasis kertas (Cek/Bilyet/Giro), berbasis kartu (Kartu Kredit, Kartu Debit) dan berbasis elektronik.

Penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, kenyamanan, dan keamanan sistem pembayaran disebut sebagai inovasi dan digitalisasi pembayaran. Dompot digital, QRIS, kartu perbankan, dan sistem pembayaran berbasis biometrik adalah

beberapa contoh dari teknologi ini. Selain itu, digitalisasi pembayaran meningkatkan daya saing sektor perbankan dan mendorong terciptanya layanan keuangan baru.

Perubahan signifikan dalam cara masyarakat menangani dan berinteraksi dengan uang tercermin dalam peralihan dari pembayaran tradisional ke pembayaran digital. Kemunculan teknologi digital seperti komputasi seluler, kecerdasan buatan (AI), dan Internet of Things (IoT) telah memengaruhi industri pembayaran dan mengantarkan era pembayaran digital. Kecepatan, keamanan, dan efisiensi metode pembayaran tradisional seperti menggunakan uang tunai, cek, atau kartu kredit menjadi terbatas. Di sisi lain, pembayaran digital menawarkan solusi yang lebih canggih yang disesuaikan dengan permintaan pelanggan kontemporer. Misalnya, orang dapat menggunakan perangkat seluler mereka untuk melakukan transaksi keuangan kapan saja dan dari mana saja berkat mobile banking. Aplikasi digital seperti OVO, GO-PAY, dan DANA menyediakan opsi pembayaran non-tunai untuk berbagai penggunaan, termasuk pembayaran tagihan, belanja online, dan transportasi online. Perkembangan ini menghilangkan kebutuhan akan uang tunai dan membuat transaksi menjadi lebih efisien. Meskipun pembayaran tradisional masih digunakan, seiring dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi dan pergeseran perilaku konsumen, penggunaan pembayaran digital terus berkembang. Perbankan digital, dompet elektronik, dan sistem pembayaran QRIS semakin mengubah lanskap pembayaran global (Maulidah, Astuti, Dkk, 2024).

QRIS merupakan standar kode QR untuk pembayaran digital melalui aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik, atau mobile banking. Tujuan adanya QRIS ini agar pembayaran digital menjadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator satu pintu karena telah berstandar. Jenis pembayaran menggunakan QRIS yaitu Merchant Presented Mode (MPM) Statis, Merchant Presented Mode (MPM) Dinamis, dan Customer Presented Mode (CPM). Saat ini, dengan QRIS seluruh aplikasi pembayaran dari Penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung parkir, tiket wisata, donasi (merchant) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. Di mana QRIS ini juga sudah memiliki ketentuan berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur NO.21/18/PADG/2019. Metode pembayaran statis dan dinamis digunakan oleh QRIS dalam transaksi keuangan. Sistem pembayaran melibatkan pemindaian barcode, setelah itu dana elektronik pengguna secara otomatis dikirim ke dompet elektronik penyedia QRIS. Transaksi kemudian dapat secara otomatis tercatat dan dilihat kapan pun yang Anda mau. Hal ini memudahkan rekonsiliasi bagi penyedia QRIS, yang berpotensi mencegah tindak kecurangan dalam pembukuan transaksi tunai.

Berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025), dalam empat tahun terakhir telah terjadi pergeseran yang signifikan dalam transformasi digital di Indonesia berkat implementasi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS), Standar Nasional Open-API Pembayaran (SNAP), BI-FAST, reformasi regulasi, dan program elektronifikasi. Peningkatan pesat volume transaksi pembayaran digital di Indonesia sejalan dengan inklusi ekonomi dan keuangan yang signifikan. Transformasi digital yang dipayungi oleh Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) terbukti memberikan dampak positif dan menjadi pendorong utama lompatan besar dalam transformasi digital serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Meskipun ada kemajuan yang menggembirakan, kita masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi dengan respons yang tepat dan terukur. Untuk memanfaatkan potensi peningkatan transaksi digital di masa mendatang, tiga hal penting perlu diperhatikan. Pertama, kita membutuhkan infrastruktur yang berdaya tahan dan sinergis. Kedua, struktur industri perlu lebih solid dan mampu mengurangi risiko praktik *shadow banking*. Ketiga, Bank Indonesia dan pelaku industri perlu bekerja sama untuk mendorong inovasi dan penerimaan transaksi digital secara seimbang, sambil meningkatkan pemahaman atau literasi dan perlindungan konsumen. Bank Indonesia merumuskan BSPI 2030 untuk merespons dinamika tersebut. BSPI 2030 bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran Indonesia yang berdaya tahan dalam struktur yang konsolidatif. BSPI 2030 adalah kelanjutan dari BSPI 2025 yang dibangun untuk mengintegrasikan EKD secara end-to-end. BSPI 2030 juga merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam memenuhi amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 3 (tiga) sasaran kebijakan, yaitu: Transaksi dan Velositas, berupa transaksi sistem pembayaran ritel dan wholesale yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal; Struktur, berupa struktur industri jasa sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif dengan praktik pasar yang efisien dan wajar; Infrastruktur, berupa infrastruktur yang stabil, modern, sesuai standar internasional, dan memenuhi aspek 3i (interkoneksi, interoperability, dan integrasi), baik bagi infrastruktur yang diselenggarakan Bank Indonesia maupun infrastruktur yang diselenggarakan oleh industri.

Diproyeksikan bahwa inovasi dalam layanan pembayaran di Indonesia akan terus berkembang. Didorong oleh kemajuan *fintech* dan *e-commerce*, pasar akan semakin diramaikan oleh *start-up* dan pemain non-bank yang menghadirkan solusi pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien. Tren penggunaan *e-wallet*, pembayaran kode QR, serta integrasi dengan platform digital diperkirakan akan semakin meluas. Pemanfaatan API dan teknologi mutakhir memungkinkan pengalaman pembayaran yang lebih fokus pada kebutuhan pengguna. Dengan menganalisis data gabungan dari *fintech*, *e-commerce*, dan transaksi pembayaran, penyedia layanan di masa depan memiliki potensi untuk memberikan layanan yang lebih personal dan menemukan peluang pasar baru dengan lebih akurat.

Pengaturan Sistem Pembayaran di Indonesia

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia (BI) memiliki peran sentral dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tujuannya adalah menciptakan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Hal ini penting untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan mendorong inklusi keuangan di Indonesia. BI berwenang melaksanakan tugas di bidang sistem pembayaran untuk memperlancar mekanisme transaksi dan meminimalisir risiko. Sistem pembayaran di Indonesia telah berkembang pesat dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa perkembangan penting dalam sistem pembayaran di Indonesia:

- a. Sistem Pembayaran Tunai: Awalnya, sistem pembayaran di Indonesia menggunakan sistem barter, kemudian berkembang menjadi uang komoditas, dan akhirnya menggunakan uang kertas dan logam. Contohnya seperti layanan pick-up service, seperti Cash & Cheque Pick Up dari Bank CIMB Niaga, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan lebih aman dan efisien.
- b. Sistem Pembayaran Non-Tunai: Sistem pembayaran non-tunai mulai berkembang dengan penggunaan cek, bilyet giro, dan kartu kredit. Saat ini, sistem pembayaran non-tunai semakin populer dengan adanya teknologi digital seperti internet banking, mobile banking, dan e-money.

Fokus utama BI adalah menciptakan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan memiliki tata kelola yang baik, serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran adalah kunci keberhasilannya. Sistem yang aman, andal, dan efisien akan meningkatkan kepercayaan dan mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai (Tawakalni, Dewani, 2020). Kebijakan sistem pembayaran di Indonesia, yang dirumuskan oleh BI, bertujuan untuk kelancaran dan keamanan pembayaran. Ini mencakup pengaturan mengenai alat pembayaran, penyelenggara, infrastruktur, dan mekanisme pembayaran. Kebijakan ini juga bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran yang ditetapkan BI bertujuan mendukung efisiensi perekonomian, memperlancar perdagangan dan pengelolaan uang, serta memastikan ketersediaan uang kartal yang cukup dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Thamrin, 2018).

Bank Indonesia memiliki tanggung jawab sebagai lembaga pengawas sistem pembayaran di Indonesia. Tanggung jawab ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh layanan sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Bank Indonesia berwenang memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, baik yang dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri maupun pihak lain. Untuk memantau hal ini, Bank Indonesia mewajibkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan, yang juga berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Aturan hukum yang melandasi wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:

- a. Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
- b. Bank Indonesia mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan mereka secara teratur.
- c. Indonesia memiliki wewenang untuk menetapkan aturan dan standar tentang penggunaan alat pembayaran yang sah dan aman.

Untuk melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia diberikan perangkat hukum yang mencakup undang-undang dan peraturan terkait sistem pembayaran, termasuk aturan main berbagai pihak yang terlibat seperti antarbank, antarbank dengan bank sentral, antarbank dan nasabah, dan lain-lain. Keberadaan perangkat hukum ini dianggap sangat penting untuk menjamin aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dan mencegah hal-hal yang dapat menghambat penyelenggaraan serta pengembangan sistem pembayaran. Sebagai contoh, penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik memerlukan perangkat hukum yang mengatur bukti pembayaran elektronik agar penyelenggaraan sistem tersebut efektif dan efisien. Lebih lanjut, teks ini menyebutkan beberapa aturan hukum pokok yang menjadi dasar sistem pembayaran di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. KUHPerdata dan KUHD menjadi dasar dalam perjanjian yang berhubungan dengan sistem pembayaran. Sementara pengaturan sistem pembayaran digital di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025: BI memiliki lima visi untuk sistem pembayaran Indonesia, yaitu: mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional, mendukung digitalisasi perbankan, menjamin interlink antara fintech dengan perbankan, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan perlindungan konsumen, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara. Arah Kebijakan Sistem Pembayaran BI telah menyusun arah kebijakan sistem pembayaran yang mengacu pada implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 dan BSPI 2030. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang berdaya tahan dan konsolidatif. BI memiliki beberapa inisiatif untuk mengembangkan sistem pembayaran digital, yaitu: Infrastruktur: Penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel, Industri: Konsolidasi struktur melalui penataan akses dan entry policy sesuai profil risiko pelaku, Inovasi: Menjamin keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, Internasional: Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara, Rupiah Digital: Pengembangan infrastruktur data melalui pengembangan Payment ID dan sistem data capturing, Peraturan dan Pengawasan: BI juga memiliki peraturan dan pengawasan untuk sistem pembayaran digital, seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Atmaja, 2022).

Tantangan dan Prospek Kedepan Yang Dihadapi BI

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjalankan kebijakan moneter. Tantangan ini disebabkan oleh perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, seperti perubahan ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, dan dinamika ekonomi domestik. Oleh karena itu, Bank Indonesia perlu memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan. Penguatan kerangka kerja kebijakan moneter Bank Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, memperkuat stabilitas sistem keuangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan moneter. Bank Indonesia juga perlu meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, baik domestik maupun internasional, untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat menjalankan kebijakan moneter yang efektif dan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Indonesia. Untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang lebih kokoh, perbaikan harus dilakukan di berbagai

bidang, terutama untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan dalam beberapa tahun belakangan ini. Tantangan utamanya meliputi pertumbuhan kredit yang rendah, struktur perbankan yang tidak optimal, dan konsolidasi perbankan yang lambat. Masalah-masalah ini perlu diatasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan membangun sistem perbankan yang kuat. Tantangan spesifiknya seperti dokumen tersebut menguraikan beberapa tantangan spesifik, seperti pertumbuhan kredit yang rendah karena keterbatasan modal dan masalah manajemen risiko, struktur perbankan yang didominasi oleh beberapa bank besar, dan upaya konsolidasi yang lambat. Tantangan lainnya termasuk layanan perbankan yang tidak memadai, perlunya peningkatan pengawasan bank, kemampuan perbankan yang lemah, profitabilitas yang tidak berkelanjutan, dan perlunya perlindungan pelanggan yang lebih baik.

Bank Indonesia (BI) menghadapi prospek dan tantangan yang rumit dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prospek yang menggembirakan mencakup kemungkinan bangkitnya ekonomi global dan domestik setelah pandemi, didorong oleh kemajuan pesat inovasi digitalisasi sistem pembayaran serta penguatan integrasi ekonomi dan keuangan di tingkat regional. Namun, tantangan besar tetap ada, seperti ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, inflasi global yang terus-menerus, potensi gejolak pasar keuangan, serta perlunya penyesuaian kebijakan terhadap kemajuan teknologi finansial (fintech) yang terus berubah. Selain itu, BI juga harus terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait guna mempertahankan stabilitas makroekonomi serta mendorong inklusi keuangan.

Prospek peningkatan transaksi di masa yang akan datang hanya dapat ditangani dengan baik melalui kolaborasi layanan antara Bank Indonesia dan sektor industri. BI-FAST tidak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi peningkatan transaksi yang ada. Selain menghadapi kerentanan operasional, menjadikan BI-FAST sebagai satu-satunya infrastruktur juga menimbulkan risiko besar berupa titik kegagalan tunggal. Kolaborasi antara BI-FAST dan sistem pembayaran yang disediakan oleh industri sangat penting untuk bersama-sama memberikan layanan transaksi dan saling mendukung.

Kemungkinan percepatan transaksi digital di masa depan hanya bisa dihadapi dengan respons yang gesit oleh infrastruktur yang kokoh, yaitu infrastruktur yang tidak hanya stabil tetapi juga dapat berkembang, serta bersinergi dalam penyediaan layanan. Kapabilitas juga harus terus dikembangkan untuk menjawab perubahan dalam kebutuhan masyarakat terhadap transaksi. Prospek ini juga memerlukan dukungan dari struktur industri yang terintegrasi dan sehat, yang tercermin dalam kuatnya hubungan antar pelaku serta kapasitas yang tinggi dalam pengelolaan dan kontrol risiko (Indonesia, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran krusial Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui sistem pembayaran yang efisien, aman, dan andal telah mengalami perkembangan pesat. Stabilitas sistem keuangan dan moneter adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, di mana sistem pembayaran menjadi infrastruktur penting untuk aktivitas ekonomi dan transmisi kebijakan moneter. BI memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sistem pembayaran, serta menghadapi tantangan dari kemajuan teknologi dan digitalisasi yang pesat. Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia mengalami transformasi signifikan, dari sistem tunai tradisional menuju sistem non-tunai yang didorong oleh inovasi digital. BI secara aktif mendukung perkembangan ini melalui berbagai inisiatif seperti QRIS dan BI-FAST, yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang inklusif, efisien, dan aman. Pengaturan sistem pembayaran oleh BI mencakup berbagai aspek, termasuk alat pembayaran, penyelenggara, infrastruktur, dan mekanisme pembayaran, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Meskipun terdapat prospek positif seperti pertumbuhan ekonomi dan inovasi digital, BI juga menghadapi berbagai tantangan kompleks. Tantangan-tantangan tersebut meliputi perubahan ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, dinamika ekonomi domestik, dan kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan fintech. Untuk mengatasi tantangan ini, BI perlu memperkuat kerangka kerja kebijakan moneter, meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, dan terus mendorong inovasi yang seimbang dengan perlindungan konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih juga kepada kolega peneliti yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan selama proses penelitian berlangsung. Khususnya, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada ibu Rini Puji Astuti atas bantuannya, motivasi dan bimbingannya dalam menyelesaikan penelitian ini hingga ke tahapan publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya., S. T. (2003). *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (Ppsk).
- Atmaja. ((2022)). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol.51(No.3), 271-286.
- Bank Indonesia. (2024). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 Bank Indonesia: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional untuk Generasi Mendatang*. Jakarta: Bank Indonesia bank sentral republik indonesia.
- BI Apresiasi Dukungan Industri Dalam Menata Sistem Pembayaran Indonesia”, https://www.bi.go.id/Id/Publikasi/Ruang-Media/News-Release/Pages/Sp_231421.aspx, Diakses 15 Mei 2025.

- Fauzi, A., Widayati, E., & Dkk. (2023). Peranan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Menjaga Sistem Pembayaran. *Jaman Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, Vol. 3 (No. 1), 3.
- Handayani, M., Farliani, T., Fandika,, R., & Indah Islami. (2021). Peran Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Tengah Pandemi Covid 19”, *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, Vol. 5(No. 2), 172.
- Maulidah, A. R., Astuti,, R. P., & Dkk. (2024). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital: Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, Vol.01 (No. 04), 801.
- Ruung, D. E., Agustina, N. P., & Andea, V. M. (2024). Analisis Strategi Pengawasan Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia”. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 (No. 1), 1-2.
- Sekarsari, K. A., Sulistyaningrum, C. D., & Subarno, A. (2021). Optimalisasi Penerapan Quick Response Code Indonesia Standard (Qris) Pada Merchant Di Wilayah Surakarta”, *Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, Vol. 5 (No. 2), 43-45.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, B. A., Harahap, I., Nabillah, R., & Silaban, P. S. (2024). Peranan Dan Strategi Bank Indonesia Serta Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jleb: Journal Of Law Education And Business E-Issn*, Vol. 2(No. 1), 177-178.
- Tawakalni, Dewani. (2020). *Dampak Inovasi Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah. Jakarta
- Thamrin. (2018). *Bank Dan Lembaga Keuangan Bank*. Jakarta: Mitra Wacana Media.